**RANCANGAN**

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rancangan Peraturan** | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| Batang Tubuh | Penjelasan |
| Menimbang: | 1. Umum |  |  |
| 1. bahwa untuk meningkatkan daya saing industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah di tengah persaingan lembaga keuangan, diperlukan kebijakan yang mendukung upaya industri untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dalam penyediaan produk dan layanan kepada masyarakat. | Perkembangan produk dan layanan keuangan terutama yang memanfaatkan teknologi informasi semakin meningkat tidak hanya pada industri perbankan namun juga lembaga keuangan nonbank. BPR dan BPRS sebagai salah satu jenis bank perlu mendapat dukungan dari sisi ketentuan dan kebijakan yang membantu terciptanya industri yang berdaya saing dalam menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada segmen usaha mikro dan kecil. Layanan tersebut dapat disediakan oleh BPR dan BPRS melalui inovasi secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan lembaga lain. |  |  |
| 1. bahwa untuk mendorong pengembangan penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, diperlukan dukungan otoritas melalui pengaturan yang responsif dan berbasis prinsip dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; | Inovasi produk BPR dan BPRS khususnya yang memanfaatkan teknologi informasi dapat mendukung terciptanya efisiensi industri dan membantu percepatan inklusi keuangan regional. Meski demikian hal tersebut juga menimbulkan tantangan yang berkaitan dengan kemampuan BPR dan BPRS dalam menyelenggarakan produk dan mengelola risikonya.  Oleh karena itu diperlukan perubahan pengaturan menjadi lebih responsif dan berbasis prinsip dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kemampuan BPR dan BPRS dalam menyelenggarakan produk. Perubahan pengaturan tersebut dilakukan antara lain melalui pengelompokan kegiatan usaha yang sebelumnya dikaitkan dengan modal inti disesuaikan menjadi pendekatan risiko dan penerapan prinsip umum penyelenggaraan produk terutama yang berkaitan dengan kemampuan permodalan dan keuangan serta manajemen risiko. |  |  |
| 1. bahwa untuk mendukung bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dibutuhkan percepatan dan penyempurnaan pemberian persetujuan penyelenggaraan produk dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah; | Selain itu, penyelenggaraan produk oleh BPR dan BPRS perlu mempertimbangkan pula kebutuhan layanan keuangan nasabah dan masyarakat sekitar. BPR dan BPRS juga perlu memastikan bahwa prosedur penyelenggaraan produk dapat berjalan dengan baik. Percepatan dan penyempurnaan pemberian persetujuan penyelenggaran produk menjadi aspek penting lain yang perlu untuk diperbaiki agar tujuan perlindungan nasabah dapat tercapai. |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri BPR dan BPRS, baik di tingkat regional maupun nasional. Peningkatan daya saing tersebut juga diikuti dengan peningkatan tanggung jawab BPR dan BPRS atas penyelenggaraan Produk, sehingga setiap inovasi dalam bentuk kegiatan usaha dan layanan dapat dipertanggungjawabkan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN |  |  |  |
| Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I  KETENTUAN UMUM |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 1 |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. |  |  |  |
| 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. |  |  |  |
| 1. Produk BPR atau BPRS yang selanjutnya disebut Produk adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR atau BPRS dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa serta kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB II  PRODUK BPR DAN BPRS |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 2 |  |  |
| 1. Produk BPR dan BPRS dikelompokkan menjadi: 2. Produk dasar; dan | Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Produk lanjutan. | Huruf b  Produk lanjutan merupakan Produk BPR atau BPRS selain Produk dasar. |  |  |
| 1. Produk dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas produk, layanan, dan/atau jasa serta kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS yang merupakan kegiatan: | Ayat (2) |  |  |
| 1. penghimpunan dana; | Huruf a  Produk dasar yang terkait dengan penghimpunan dana antara lain simpanan berupa tabungan dan/atau deposito berjangka dan pinjaman yang diterima. |  |  |
| 1. penyaluran dana; | Huruf b  Produk dasar yang terkait dengan penyaluran dana berupa kredit atau pembiayaan. |  |  |
| 1. penempatan dana; dan/atau | Huruf c  Produk dasar yang terkait dengan penempatan dana termasuk meminjam dana dari bank lain dan meminjamkan dana kepada bank lain, dalam bentuk:   1. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah; dan 2. deposito berjangka dan/atau tabungan pada BPR dan BPRS. |  |  |
| 1. dasar lain. | Huruf d  Produk yang terkait dengan kegiatan dasar lain antara lain:   1. pemindahan atau transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; 2. layanan pembayaran gaji karyawan secara massal; 3. layanan penerimaan dana dalam rangka jasa pembayaran tagihan; 4. kegiatan keagenan antara lain agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau agen layanan keuangan digital; dan 5. kerja sama dengan lembaga lain dalam pemberian layanan jasa keuangan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah antara lain *bancassurance* model bisnis referensi, pemasaran uang elektronik dari penerbit lain, kerja sama penerimaan dan/atau pengiriman uang dari dan ke luar negeri, dan kerja sama dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan model bisnis referensi. |  |  |
| 1. Produk lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas produk, layanan, dan/atau jasa serta kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS yang: 2. berbasis teknologi informasi; | Ayat (3)  Huruf a  Produk yang berbasis teknologi informasi antara lain:   1. layanan perbankan elektronik yaitu layanan bagi nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik, seperti *short message service* (SMS) *banking*, *mobile banking*, atau *internet banking*; 2. penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif; dan 3. kegiatan berbasis teknologi informasi lain bagi nasabah melalui media atau perangkat yang terhubung dengan sistem atau data BPR atau BPRS. |  |  |
| 1. berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau kegiatan yang memengaruhi penilaian profil risiko BPR atau BPRS; dan/atau | Huruf b  Produk yang berkaitan dengan produk atau kegiatan lembaga jasa keuangan nonbank antara lain:   1. *bancassurance* model bisnis distribusi; 2. *bancassurance* model bisnis integrasi; dan/atau 3. kerja sama dengan lembaga jasa keuangan nonbank dalam pemasaran produk keuangan.   Produk yang memengaruhi penilaian profil risiko BPR atau BPRS merupakan Produk lanjutan selain yang telah disebutkan, antara lain:   1. layanan *safe deposit box*; 2. kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan 3. kerja sama dengan lembaga lain dalam pemberian layanan jasa keuangan seperti kerja sama dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan model bisnis *channeling*. |  |  |
| 1. memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain. | Huruf c  Produk yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain, antara lain:   1. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; dan/atau 2. penyedia jasa pembayaran lain. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan Produk lanjutan menjadi Produk dasar. | Ayat (4)  Kriteria penetapan Produk lanjutan menjadi Produk lanjutan antara lain tingkat risiko Produk dimaksud. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 3 |  |  |
| 1. Dalam hal Produk BPR dan BPRS memenuhi kriteria: 2. tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh BPR atau BPRS yang bersangkutan; atau | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPR atau BPRS yang bersangkutan namun dilakukan pengembangan Produk yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk, |  |  |  |
| Produk BPR dan BPRS dikategorikan menjadi Produk baru. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPR harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana bisnis BPR dan BPRS. | Ayat (2)  Pencantuman rencana penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS tidak mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melarang penyelenggaraan Produk. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB III  PRINSIP PENYELENGGARAAN PRODUK BPR DAN BPRS |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 4 |  |  |
| BPR dan BPRS memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan Produk dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola yang berlaku bagi BPR dan BPRS. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 5 |  |  |
| Dalam penyelenggaraan Produk lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, BPR dan BPRS harus memperhatikan prinsip penyelenggaraan Produk paling sedikit meliputi: | Prinsip penyelenggaraan Produk dipenuhi oleh BPR dan BPRS selama proses penyelenggaraan Produk secara konsisten dan berkesinambungan dimulai sejak perencanaan hingga implementasi. |  |  |
| 1. permodalan yang memadai; dan | Huruf a  Kemampuan permodalan BPR dan BPRS paling sedikit meliputi:   1. pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum sesuai dengan:    1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat; atau    2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah; dan 2. kecukupan modal dalam menyerap risiko yang mungkin timbul atas penyelenggaraan Produk. |  |  |
| 1. penerapan manajemen risiko secara efektif, | Huruf b  Penerapan manajemen risiko secara efektif secara umum meliputi pilar utama yang diatur dalam:   1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; atau 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah,   yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang timbul dalam penyelenggaraan Produk.  Termasuk dalam penerapan manajemen risiko yaitu BPR dan BPRS memastikan kesiapan teknologi informasi terutama untuk Produk lanjutan berbasis teknologi informasi. |  |  |
| untuk mendukung kesinambungan penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 6 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis dalam rangka penyelenggaraan Produk. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: | Ayat (2) |  |  |
| * 1. penetapan manfaat bisnis dan kebutuhan nasabah terhadap Produk; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. identifikasi seluruh risiko yang melekat pada Produk serta mitigasinya; | Huruf b  Identifikasi seluruh risiko pada Produk baru dilakukan oleh BPR dan BPRS antara lain untuk:   1. mengukur tingkat risiko dan mitigasi yang mungkin dilakukan oleh BPR atau BPRS sebelum Produk diselenggarakan; dan 2. menentukan kriteria Produk yang akan diselenggarakan sebagai Produk baru. |  |  |
| * 1. metode pencatatan dan sistem informasi akuntansi untuk Produk; | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. penetapan kriteria dan proses evaluasi terhadap pihak yang bekerja sama dengan BPR atau BPRS dalam penyelenggaraan Produk; dan | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. metode pengukuran dan pemantauan risiko atas Produk BPR atau BPRS. | Huruf e  Pengukuran dan pemantauan dilakukan oleh BPR dan BPRS antara lain untuk:   1. mengevaluasi risiko dan manfaat bisnis yang timbul dari penyelenggaraan Produk; dan 2. kesesuaian realisasi penyelenggaraan produk dengan rencana atau target yang sebelumnya disusun. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib melakukan kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atau ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:    1. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS;    2. penghentian Produk tertentu;    3. larangan untuk menyelenggarakan Produk baru; dan/atau    4. pelaksanaan penilaian kembali bagi pihak utama BPR atau BPRS. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IV  MEKANISME PENYELENGGARAAN PRODUK BARU |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Produk BPR dan BPRS Dasar Baru |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 7 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang menyelenggarakan Produk dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk dasar baru paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Produk dasar baru. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Produk BPR dan BPRS Lanjutan Baru |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 8 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib memperoleh persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru dari Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS melaksanakan proyek uji coba terbatas. | Ayat (2)  Proyek uji coba terbatas (*piloting review*) merupakan sarana yang digunakan BPR dan BPRS untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, menguji keakuratan dan berfungsinya sistem, serta mengevaluasi dampak uji coba terbatas terhadap profil risiko BPR dan BPRS. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib melaporkan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan proyek uji coba terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3) |  |  |
| 1. Laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menetapkan ruang lingkup dan skenario pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Ayat (5)  Penetapan ruang lingkup dan skenario proyek uji coba terbatas bertujuan agar BPR dan BPRS dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Produk lanjutan baru.  Penetapan ruang lingkup atau batasan uji coba dapat disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil oleh BPR dan BPRS sesuai dengan kebijakan dan pedoman tertulis penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS.  Ruang lingkup proyek uji coba terbatas antara lain target nasabah dan/atau calon nasabah, lokasi atau wilayah uji coba terbatas, dan limit transaksi.  Skenario pelaksanaan proyek uji coba terbatas paling sedikit mencakup kondisi kegagalan pelaksanaan proyek uji coba terbatas serta penyelesaian yang harus dilakukan oleh BPR dan BPRS. |  |  |
| 1. Dalam proyek uji coba terbatas, BPR dan BPRS wajib menginformasikan kepada calon nasabah dan/atau nasabah bahwa Produk yang digunakan merupakan Produk lanjutan yang sedang diujicobakan dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (6)  BPR dan BPRS mendokumentasikan penyampaian informasi kepada calon nasabah dan/atau nasabah mengenai Produk lanjutan yang sedang diujicobakan secara memadai. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 9 |  |  |
| Selama pelaksanaan proyek uji coba terbatas, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian atas pelaksanaan proyek uji coba terbatas yang dilakukan oleh BPR dan BPRS. | Penilaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan proyek uji coba terbatas (*proof of concept*), antara lain dilakukan melalui pertemuan untuk membuktikan bahwa konsep Produk yang diujicobakan layak dan siap untuk diselenggarakan.  Evaluasi dan rekomendasi perbaikan dari Otoritas Jasa Keuangan mencakup antara lain ruang lingkup dan jangka waktu uji coba terbatas, kesiapan infrastruktur dan sumber daya BPR dan BPRS, kendala yang dihadapi, langkah mitigasi risiko yang dilakukan, serta penyelesaian permasalahan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 10 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah BPR dan BPRS menyelesaikan seluruh proses proyek uji coba terbatas. | Ayat (1)  Proyek uji coba terbatas dikategorikan telah selesai dalam hal BPR dan BPRS telah memastikan bahwa selama periode proyek uji coba tidak terdapat permasalahan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan Produk, termasuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan jangka waktu uji coba terbatas yang telah ditetapkan. |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung penyelesaian proyek uji coba terbatas. | Ayat (2)  Dokumen pendukung dimaksud dapat berupa dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi akhir Produk yang telah diujicobakan. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh persyaratan dipenuhi oleh BPR dan BPRS. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR dan BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 11 |  |  |
| 1. Dalam hal memenuhi kriteria yang ditetapkan, BPR dan BPRS mengajukan permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru tanpa melalui proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | Ayat (2) |  |  |
| * 1. Produk lanjutan baru berkaitan dengan produk atau kegiatan lembaga jasa keuangan nonbank yang memerlukan izin dan/atau persetujuan; | Huruf a  Yang dimaksud dengan “izin dan/atau persetujuan” yaitu izin dan/atau persetujuan dari pengawas lembaga jasa keuangan nonbank. |  |  |
| * 1. Produk lanjutan baru memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. Produk lanjutan baru merupakan produk, layanan, dan/atau jasa untuk pelaksanaan program pemerintah; dan/atau | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. BPR dan BPRS membuktikan bahwa penyelenggaraan Produk lanjutan baru tidak memerlukan proyek uji coba terbatas. | Huruf d  BPR dan BPRS menyampaikan penjelasan tidak perlu dilakukannya proyek uji coba terbatas yang menunjukkan bahwa rencana penyelenggaraan Produk tidak berdampak material terhadap profil risiko, predikat tingkat kesehatan, rasio keuangan utama, serta alasan bisnis yang melatarbelakanginya. |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan persetujuan diajukan tanpa melalui proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan baru yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain. | Ayat (4)  Penyampaian permohonan izin dan/atau persetujuan kepada otoritas lain disertai dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penyelenggaraan Produk lanjutan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh persyaratan dipenuhi oleh BPR atau BPRS. | Ayat (6)  Dokumen permohonan diterima secara lengkap meliputi jumlah dan muatan pada dokumen yang sesuai dengan persyaratan. |  |  |
| 1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR dan BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 12 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan baru berupa: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. pengembangan dari kegiatan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a; atau |  |  |  |
| 1. kegiatan yang memengaruhi penilaian profil risiko BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, |  |  |  |
| dapat dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10. |  |  |  |
| 1. Penyelenggaraan Produk lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan memperhatikan kebijakan dan/atau ketentuan sektor lembaga jasa keuangan nonbank dan/atau otoritas lain. |  |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kriteria: | Ayat (2) |  |  |
| 1. memiliki peringkat risiko sekurang-kurangnya peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) dalam dua periode terakhir; dan | Huruf a  Penilaian peringkat profil risiko yang digunakan merupakan hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| 1. tingkat kesehatan dengan predikat sehat atau peringkat komposit 1 (satu) dalam dua periode terakhir, | Huruf b  Penilaian tingkat kesehatan yang digunakan merupakan hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterapkan. |  |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan permohonan persetujuan dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum penyelenggaraan Produk lanjutan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk BPR lanjutan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (4)  Kelengkapan dokumen pendukung meliputi jumlah dan muatan pada dokumen yang sesuai dengan persyaratan. |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru yang diajukan oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku secara efektif. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 13 |  |  |
| 1. Dalam hal: | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); |  |  |  |
| 1. hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau |  |  |  |
| 1. rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), |  |  |  |
| tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan tertentu. |  |  |  |
| 1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. meminta BPR dan BPRS untuk memenuhi persyaratan dan/atau menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan menjadi uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10; | Huruf a  Rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru melalui mekanisme penyampaian pemberitahuan disesuaikan menjadi mekanisme uji coba terbatas. |  |  |
| 1. meminta BPR dan BPRS untuk memenuhi persyaratan dan/atau menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan menjadi persetujuan tanpa uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); atau | Huruf b  Rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas atau rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru melalui mekanisme penyampaian pemberitahuan disesuaikan menjadi mekanisme persetujuan tanpa uji coba terbatas. |  |  |
| 1. menghentikan rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru. | Huruf c  Termasuk menghentikan yaitu meminta BPR dan BPRS untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain, jika telah dilaksanakan proyek uji coba terbatas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 14 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang menyelenggarakan Produk lanjutan baru wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk lanjutan baru paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Produk lanjutan baru. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:    1. jenis dan nama Produk lanjutan baru;    2. tanggal penyelenggaraan Produk lanjutan baru disertai bukti yang relevan menjelaskan penyelenggaraan Produk lanjutan pertama kali; dan    3. uraian mengenai kesesuaian antara implementasi dan persetujuan atas Produk lanjutan baru yang diselenggarakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 15 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS harus menyelenggarakan Produk lanjutan baru paling lama 6 (enam) bulan sejak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila BPR dan BPRS tidak menyelenggarakan Produk lanjutan baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak persetujuan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 16 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan/atau Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan/atau Pasal 12 ayat (4), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS; 3. penghentian Produk tertentu; dan/atau 4. pelaksanaan penilaian kembali bagi pihak utama BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per Produk dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Produk. |  |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi BPR atau BPRS yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 14. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB V  PENGHENTIAN PRODUK BPR ATAU BPRS |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 17 |  |  |
| Penghentian Produk BPR atau BPRS dapat dilakukan berdasarkan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. inisiatif dari BPR atau BPRS; atau |  |  |  |
| 1. perintah Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 18 |  |  |
| 1. Rencana penghentian Produk berdasarkan inisiatif dari BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR dan BPRS, disampaikan dalam rencana bisnis BPR dan BPRS. | Ayat (1)  Penilaian terhadap penghentian Produk yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR dan BPRS dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penghentian. | Ayat (2)  Laporan realisasi penghentian Produk antara lain memuat informasi dan penjelasan mengenai:   1. jenis dan nama Produk BPR dan BPRS yang dihentikan; 2. waktu penghentian; 3. alasan penghentian; dan 4. penjelasan mengenai langkah penyelesaian atau pengalihan kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per Produk dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Produk. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi BPR atau BPRS yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 19 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan BPR dan BPRS untuk menghentikan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b jika memenuhi kriteria:    1. Produk yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau    2. terdapat pertimbangan lain. | Ayat (1)  Pertimbangan lain antara lain:   1. penyelenggaraan Produk memengaruhi atau berpotensi memperburuk profil risiko BPR atau BPRS; 2. timbulnya kerugian yang material terhadap kondisi keuangan BPR atau BPRS; 3. terdapat informasi mengenai sanksi penghentian atau pencabutan izin pelaksanaan Produk tertentu oleh otoritas lain; 4. penyelenggaraan Produk tidak sesuai dengan permohonan persetujuan atau laporan realisasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau 5. tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, bagi BPRS. |  |  |
| 1. Penghentian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlaku sementara maupun permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS yang diperintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 2. menyampaikan informasi kepada nasabah atas penghentian Produk; dan 3. menyampaikan rencana tindak penghentian Produk kepada Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat:    1. penyelesaian kewajiban kepada nasabah BPR atau BPRS dan/atau pihak lain;    2. penyempurnaan Produk; dan/atau    3. tindakan lain yang diperlukan | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “menghentikan” yaitu menghentikan penawaran, penjualan, dan perjanjian atau transaksi baru atas Produk BPR atau BPRS. |  |  |
| 1. Periode penghentian Produk dan batas waktu penyampaian rencana tindak penghentian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:    1. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS;    2. penghentian Produk tertentu;    3. larangan untuk menyelenggarakan Produk baru; dan/atau    4. pelaksanaan penilaian kembali bagi pihak utama BPR atau BPRS. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VI  PENYESUAIAN RENCANA PENYELENGGARAAN PRODUK |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 20 |  |  |
| 1. Berdasarkan pertimbangan tertentu, BPR dan BPRS dapat melakukan penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru selain yang telah disampaikan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). | Ayat (1)  Pertimbangan tertentu antara lain:   1. penyelenggaraan Produk bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah; dan/atau 2. Produk baru tidak secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR dan BPRS. 3. bentuk tindak lanjut dari kebijakan industri keuangan dan/atau implementasi dari fatwa baru yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.   Penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk meliputi penambahan rencana penyelenggaraan Produk baru dan/atau penyempurnaan atas rencana rencana penyelenggaraan Produk baru yang sebelumnya telah tercantum dalam rencana bisnis. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana penyelenggaraan Produk baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan rencana penyesuaian penyelenggaraan Produk baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Produk baru. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Format penyampaian penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menyetujui atau tidak menyetujui penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru yang disampaikan oleh BPR atau BPRS. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VII  PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN/ATAU PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 21 |  |  |
| BPR dan BPRS wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. | Penerapan prinsip perlindungan konsumen antara lain dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 22 |  |  |
| 1. BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam menyelenggarakan Produk. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemenuhan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan: | Ayat (2) |  |  |
| * 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penyelenggaraan Produk atau surat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan kepada BPRS dalam hal fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum tersedia; dan | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. opini dari dewan pengawas syariah terhadap Produk BPRS baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Huruf b  Opini dari dewan pengawas syariah yaitu opini yang antara lain mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah. |  |  |
| 1. Opini dari Dewan Pengawas Syariah terkait Produk BPRS baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup: | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| * 1. Produk BPRS baru mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; |  |  |  |
| * 1. kesesuaian Produk BPRS baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, paling sedikit mencakup: |  |  |  |
| * + 1. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan; |  |  |  |
| * + 1. obyek transaksi dan tujuan penggunaan; |  |  |  |
| * + 1. kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/ margin/*ujrah*/*fee* dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang terhadap nisbah bagi hasil/margin/ujrah untuk produk penyaluran dana; |  |  |  |
| * + 1. penetapan biaya administrasi; dan |  |  |  |
| * + 1. penetapan hadiah, denda/sanksi, dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, jika ada; |  |  |  |
| * 1. standar operasional prosedur Produk BPRS baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan |  |  |  |
| * 1. hasil kaji ulang terhadap konsep akad, perjanjian, atau formulir aplikasi Produk BPRS baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 23 |  |  |
| 1. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 ayat (1), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:    1. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS;    2. penghentian kegiatan usaha tertentu;    3. larangan untuk menyelenggarakan Produk baru; dan/atau    4. pelaksanaan penilaian kembali bagi pihak utama BPR atau BPRS. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VIII  KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 24 |  |  |
| 1. BPR dan BPRS menyampaikan:    1. laporan realisasi penyelenggaraan Produk baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1);    2. laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);    3. permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (3); dan    4. laporan realisasi penghentian Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2),   secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Penyampaian laporan dan/atau permohonan persetujuan dilakukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai wilayah pengawasan BPR atau BPRS. |  |  |
| 1. Dalam hal sistem pelaporan dan/atau sistem perizinan telah tersedia, BPR dan BPRS menyampaikan laporan dan/atau permohonan persetujuan secara daring melalui sistem pelaporan dan/atau sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 25 |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai kelompok Produk, prinsip penyelenggaran Produk, dan/atau mekanisme penyelenggaraan Produk baru selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Penetapan kebijakan yang berbeda antara lain mengenai pengelompokan, persyaratan beserta dokumen administratif, dan mekanisme pelaporan atau persetujuan termasuk bagi Produk baru yang belum tercantum dalam penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  Dalam menetapkan kebijakan yang berbeda tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis dan penilaian terhadap faktor eksternal dan internal berupa data dan/atau informasi yang diperoleh berkenaan dengan Produk baru tersebut. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IX  KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 26 |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, laporan dan/atau permohonan persetujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dan produk dan/atau aktivitas baru yang telah diajukan dan diterima secara lengkap sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada saat penyampaian laporan dan/atau permohonan persetujuan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB X  KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 27 |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:   1. Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761); 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771); 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849),   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Pasal 28 |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal |  |  |  |
|  |  |  |  |
| KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| WIMBOH SANTOSO |  |  |  |

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 00/POJK.03/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Bagian A

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN LAPORAN REALISASI PENYELENGGARAAN PRODUK DASAR BARU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rancangan Peraturan** | | | | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Daftar Dokumen dan Penjelasan |
|  | Informasi umum atau ringkasan mengenai Produk baru, paling sedikit meliputi: |  |  |  |  |  |
|  | * 1. Nama dan jenis Produk baru; |  |  |  |  |  |
|  | * 1. Waktu pelaksanaan Produk baru; |  |  |  |  |  |
|  | * 1. Fitur dan model bisnis dan keterkaitan dengan strategi bisnis; |  |  |  |  |  |
|  | * 1. Manfaat penyelenggaraan Produk dasar baru bagi BPR atau BPRS |  |  |  |  |  |
|  | Analisis identifikasi dan mitigasi risiko yang melekat pada Produk dasar baru termasuk biaya bagi BPR atau BPRS. |  |  |  |  |  |
|  | Informasi mengenai manfaat dan risiko bagi nasabah. |  |  |  |  |  |
|  | Pola dan pokok perjanjian kerja sama BPR atau BPRS dengan pihak ketiga meliputi hak dan kewajiban para pihak, jika ada. |  |  |  |  |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan realisasi penyelenggaraan Produk dasar baru.

(Tempat), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai)

(Nama lengkap Direksi BPR atau BPRS)

Bagian B

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN LAPORAN RENCANA PELAKSANAAN UJI COBA TERBATAS/PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PRODUK LANJUTAN BARU/PEMBERITAHUAN RENCANA PENYELENGGARAAN PRODUK LANJUTAN BARU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rancangan Peraturan** | | | | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| No. | Uraian | Kelengkapan | | |
| Ya | Tidak | Daftar Dokumen dan Penjelasan |
| **I.** | **Dokumen umum** |  |  |  |  |  |
|  | Informasi umum atau ringkasan mengenai Produk baru, paling sedikit meliputi: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Nama dan jenis Produk baru; |  |  |  |  |  |
|  | 1. Waktu pelaksanaan Produk baru; |  |  |  |  |  |
|  | 1. Fitur dan model bisnis dan keterkaitan dengan strategi bisnis; |  |  |  |  |  |
|  | 1. Analisis bisnis berupa potensi dan segmen pasar; |  |  |  |  |  |
|  | 1. Informasi mengenai manfaat dan risiko bagi nasabah; |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kajian rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru termasuk proyeksi keuangan atas dampak dari penyelenggaraan Produk lanjutan baru khususnya terhadap rasio atau indikator keuangan utama BPR atau BPRS, paling singkat 1 (satu) tahun pertama. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Dokumen teknis** |  |  |  |  |  |
|  | Kebijakan dan prosedur mengenai analisis identifikasi dan mitigasi risiko (meliputi risiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, dan/atau stratejik) yang melekat pada penyelenggaraan Produk lanjutan baru, didukung dengan dokumen antara lain: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Standar operasional prosedur penyelenggaraan Produk lanjutan baru yang meliputi alur proses (*flow chart*), kewenangan, unit kerja dan petugas terkait, prosedur pelaksanaan sesuai alur, transparansi dan perlindungan nasabah, dan penanganan keluhan; |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penjelasan atas sistem informasi akuntansi (SIA) termasuk metode pencatatan transaksi keuangan dari Produk lanjutan baru; |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kesiapan operasional meliputi struktur organisasi serta sumber daya manusia dan teknologi informasi, serta hasil audit teknologi informasi (jika ada); |  |  |  |  |  |
|  | 1. Mekanisme perjanjian atau formulir aplikasi kepada nasabah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk uraian mengenai tata cara penyediaan informasi mengenai manfaat dan risiko Produk; |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pola hubungan bisnis dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga antara lain meliputi kesepakatan serta hak dan kewajiban para pihak, jika ada. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prosedur penerapan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penyelenggaraan Produk lanjutan baru; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Dokumen lain** |  |  |  |  |  |
|  | 1. Opini syariah dari dewan pengawas syariah terkait Produk baru, bagi BPRS. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Kesiapan atas pelaksanaan uji coba terbatas BPR atau BPRS atas Produk baru dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan dalam proses uji coba terbatas seperti ruang lingkup dan skenario pelaksanaan uji coba terbatas (jika dilakukan uji coba); |  |  |  |  |  |
|  | 1. Informasi dan dokumen pendukung lain, seperti surat izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain, atau dokumen yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lain. |  |  |  |  |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan rencana pelaksanaan uji coba terbatas/permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru/pemberitahuan rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru.

(Tempat), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan di atas meterai)

(Nama lengkap Direksi BPR atau BPRS)

Bagian C

RENCANA PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN PRODUK BPR DAN BPRS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rancangan Peraturan** | | | | | | | | | | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| No. | Jenis Produk Baru | Deskripsi Umum Produk Baru | Rencana Waktu Penyelenggaraan | Tujuan/Manfaat | | Informasi Kebutuhan Biaya | Keterkaitan dengan Strategi Bisnis | Risiko atas Penyelenggaraan Produk Baru | Mitigasi Risiko atas Penyelenggaraan Produk Baru | Alasan Penyesuaian Produk Baru |
| Bagi BPR atau BPRS | Bagi Nasabah |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bagian D

OPINI SYARIAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rancangan Peraturan** | | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| No. | Keterangan | Opini |
|  | Produk baru mendasarkan pada fatwa DSN-MUI. |  |  |  |
|  | Kesesuaian Produk baru dengan fatwa DSN-MUI paling sedikit meliputi: |  |  |  |
|  | * 1. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan; |  |  |  |
|  | * 1. obyek transaksi dan tujuan penggunaan; |  |  |  |
|  | * 1. kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/ujrah/fee dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang (review) terhadap nisbah bagi hasil/margin/ujrah (untuk produk penyaluran dana); |  |  |  |
|  | * 1. penetapan biaya administrasi; dan |  |  |  |
|  | * 1. penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, jika ada. |  |  |  |
|  | Standar operasional prosedur Produk baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. |  |  |  |
|  | Hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. |  |  |  |

Kesimpulan:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Tempat), (tanggal-bulan-tahun)

(Dewan Pengawas Syariah) (Dewan Pengawas Syariah)